

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya menuju predikat manusia dengan jatidiri yang utuh, oleh karena itu manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan perlu mendapat perhatian dan ditempatkan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dasar manusia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “Mencerdaskan kehidupan Bangsa”, tanpa berpihak kepada satu golongan tertentu. Perjuangan menempatkan pengembangan pendidikan tidak cukup dilandasi rasa memiliki dan merasa mengetahui saja, melainkan perlu sebagai perjuangan politik, dalam arti demi kepentingan masyarakat banyak dan kebaikan untuk umum.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dengan undang-undang RI. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>.Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002, *Perubahan Ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,. Pasal 31 ayat 1 dan 3. Jakarta: Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id> (diakses pada tanggal 10 Maret 2020, pukul 22.34 WIB)

Di sisi lain, pembangunan Indonesia sedang berfokus pada otonomi, dengan menyerahkan sebagian wewenang pusat kepada daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya diharapkan terjadinya perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari budaya petunjuk menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakarsa, dan aspirasi masyarakat daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3).

Dalam mempersiapkan sumber daya manusia pembangunan, pendidikan tidak hanya terfokus pada kebutuhan material tetapi harus menyentuh dasar untuk memberikan watak pada visi dan misi pendidikan, yaitu perhatian mendalam pada etika moral dan spiritual yang luhur. Dalam hal ini kualitas pendidikan dipengaruhi oleh penyempurnaan sistemik terhadap seluruh komponen pendidikan seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan penyebaran guru, kurikulum yang disempurnakan, sumber belajar, sarana dan prasarana yang memadai, iklim pembelajaran yang kondusif, serta didukung oleh kebijakan (*political will*) pemerintah, baik pusat maupun di daerah dan termasuk kebijakan kepala madrasah.

Hal ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang menuntut pengelola pendidikan agar dapat membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan secara mandiri sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menuntut

penataan manajemen dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan serta mutu tenaga pendidikan sesuai dengan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat segera terwujud termasuk kebijakan kepala madrasah dalam memimpin dan 3 mengatur kegiatan pembelajaran di madrasah sehingga dapat meningkatkan kinerja guru, pada akhirnya meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Merespon tuntutan masyarakat yang demikian, reformasi pendidikan semakin gencar digulirkan yang berdampak positif yaitu melahirkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Di antara wujud partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan adalah adanya kegiatan lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan agama, baik yang bersifat formal maupun informal, dan nonformal. Lembaga pendidikan tersebut sangat memerlukan pengelolaan dan manajemen kepemimpinan yang baik serta dikelola dalam bentuk organisasi, sebab dalam kehidupan modern seperti saat ini, makin terasa betapa pentingnya peranan organisasi terhadap kepentingan manusia termasuk dalam mengelola lembaga pendidikan

Bentuk kerjasama antara sekelompok individu dalam rangka mencapai tujuan itulah hakikat sebuah organisasi. Kata organisasi selalu mengandung dua macam pengertian secara umum, yaitu menandakan (*signifies*) suatu lembaga (*institution*) atau kelompok fungsional, dan yang lain mengandung

arti proses pengorganisasian (*proccess of organization*).<sup>2</sup> Sebuah madrasah adalah oragnisasi yang kompleks dan unik, sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Oleh sebab itu kepala madrasah yang berhasil, yaitu tercapainya tujuan madrasah, serta tujuan dari para individu yang ada di dalam lingkungan madrasah, harus memahami dan menguasai peranan organisasi dan hubungan kerja sama antara individu. Untuk membantu kepala madrasah di dalam mengorganisasikan madrasah secara tepat, diperlukan adanya satu esensi pemikiran yang teoritis, seperti konsepsi klasik tentang struktur oragnisasi, hirarki, kewibawaan dan mekanisme demi pencapaian, koordinasi di lingkungan madrasah. Kepala madrasah juga perlu memahami teori organisasi formal dan dapat memahami, mengantisipasi, memperbaiki konflik yang terjadi di lingkungan madrasah serta menganalisis kehidupan informal dan iklim sebagai suatu suasana organisasi madrasah.

Paradigma pendidikan yang memberikan kewenangan luas kepada madrasah dalam mengembangkan berbagai potensinya memerlukan peningkatan kemampuan kepala madrasah dalam berbagai aspek manajerialnya, agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban madrasah. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan misalnya, kepala madrasah dituntut untuk memiliki kemampuan melakukan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya di madrasah. Kemampuan ini diperlukan, karena sekarang madrasah diberi bantuan sarana dan prasarana oleh pemerintah langsung dalam bentuk uang sebagai wujud dari otonomi daerah (madrasah) dan desentralisasi, mau diapakan uang tersebut bergantung

---

<sup>2</sup> Wahjosumidjo, 1999. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Cet. I; Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2.

sepenuhnya kepada kebijakan kepala madrasah, yang penting dia dapat mempertanggungjawabkan secara profesional. Kepala madrasah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yakni secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di madrasah sebagaimana dikutip H.E. Mulyasa dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa: “Kepala madrasah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi madrasah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”.<sup>3</sup>

Sebagai pemimpin pendidikan, kepala madrasah mempunyai tugas melaksanakan fungsi kepemimpinan baik fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan maupun penciptaan iklim madrasah yang kondusif bagi tercipta dan terlaksananya proses pembelajaran yang baik dengan bekerja sama dan mengayomi guru sebagai mitra kerjanya dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kepala madrasah sebagai seorang manajer harus mampu

1. Merencanakan, dalam arti kepala madrasah harus benar-benar memikirkan, merumuskan dalam suatu program tujuan dan tindakan yang harus dilakukan.
2. Mengorganisasikan, berarti kepala madrasah harus mampu mengarahkan dan mempengaruhi seluruh sumber daya manusia dan sumber-sumber material, sebab
3. Keberhasilan madrasah sangat tergantung kecakapan kepala madrasah dalam mengatur dan mendaya gunakan berbagai sumber dalam mencapai tujuan.

---

<sup>3</sup> H.E. Mulyasa, 2007. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Rosda Karya, Cet.IX, hlm. 25.

4. Memimpin, dalam arti kepala madrasah mampu mengarahkan dan mempengaruhi seluruh sumber daya manusia untuk melakukan tugas-tugasnya yang esensial.
5. Mengendalikan, dalam arti kepala madrasah memperoleh jaminan, bahwa madrasah berjalan mencapai tujuan. Dan apabila terjadi kesalahan pada bagian-bagian yang ada dari madrasah tersebut, maka kepala madrasah harus memberikan petunjuk dan mengarahkan.

Tinggi rendahnya mutu pendidikan di madrasah-madrasah sangat dipengaruhi oleh variabel manajerial yang dalam hal ini kemampuan manajerial kepala madrasah dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan untuk diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di madrasah tersebut. Kelemahan dalam segi manajemen pendidikan serta kebijakan atau keputusan kepala madrasah yang tidak tepat, merupakan salah satu penyebab utama turunnya hasil belajar siswa. Salah satu unsur penting dalam manajemen madrasah adalah pengambilan keputusan dalam bentuk kebijakan yang merupakan tugas utama bagi seorang pemimpin (*manajer*). Pengambilan keputusan/kebijakan (*decision making*) diproses oleh pengambil keputusan (*decision maker*) yang menghasilkan keputusan (*decision*). Keputusan-keputusan ini akan menimbulkan aktivitas-aktivitas sehingga proses manajemen dapat terlaksana. Keputusan ini akan menimbulkan aktivitas dan atau mengakhiri aktivitas.<sup>4</sup>

Pengambilan keputusan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam manajemen suatu organisasi termasuk pada lembaga pendidikan atau

---

<sup>4</sup> Malayu S.P. Hasibuan, 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. VII hlm. 53.

madrasah. Selain itu pengambilan keputusan atau kebijakan tidak bisa dipisahkan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu bagian terpenting dalam manajemen. Tanpa adanya pengambilan keputusan atau kebijakan tidak ada kepemimpinan, maka manajemen tidak berfungsi.<sup>5</sup>

Kepemimpinan adalah untuk melakukan tindakan yang baik dan bekerja sesuai dengan tatanan Allah SWT dan bertindak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. dalam mengembangkan karakter Islam yang kuat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Ali Imran 3 : 159 yang berbunyi:<sup>6</sup>

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Ayat di atas mengisyaratkan lapangan musyawarah yaitu فِي الْأَمْرِ

yang diterjemahkan diatas dengan *dalam urusan itu* . Lapangan musyawarah adalah persoalan kemasyarakatan maka musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta soal-soal kehidupan

<sup>5</sup> Nur Kholis, 2003. *Manajemen Berbasis Madrasah Teori Model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo, hlm.183

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id> (diakses pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 22.00 WIB)

duniawi, baik yang petunjuknya bersifat global maupun yang tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan.<sup>7</sup>

Kepala madrasah tidak boleh berhati kasar dan bersikap terlalu keras tetapi harus berhati lemah lembut serta bermusyawarah sebelum mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan hendaknya memiliki informasi tentang apa yang akan diputuskan,

Madrasah aliyah didirikan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Keberadaan Madrasah aliyah diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dari segi akademis maupun non akademis. Sebagai pendidikan formal madrasah aliyah mempunyai potensi untuk berkembang sebagai lembaga pendidikan yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Dalam perkembangann hasil belajar madrasah aliyah patut dibanggakan, karena merupakan salah satu madrasah yang sudah menghasilkan hasil belajar pada tingkat kabupaten dan propinsi, terutama dibidang akademis

Naik-turunnya pencapaian hasil belajar bidang agama khususnya mata pelajaran Al-Qur'an-Hadits di Madrasah Aliyah NU Raudlatul Mu'allimin Wedung-Demak banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempenaruhi tercapainya hasil belajar mata pelajaran Al-Qur'an-Hadits di Madrasah Aliyah NU Raudlatul Mu'allimin Wedung-Demak tidak terlepas dari peranan kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan dan guru mata pelajaran Al-Qur'an-Hadits sebagai pendidik yang berhubungan langsung

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, 2002. Tafsir Al Misbah Volume 2: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, hlm. 314-316



dengan siswa di madrasah tersebut. Kepala madrasah dan guru Al-Qur'an-Hadits sangat berperan dalam rangka meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Al-Qur'an-Hadits agar bisa terlaksana secara optimal.

## **B. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini adalah tentang kepemimpinan kepala madrasah pada penyelenggara pendidikan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Model atau tipe kepemimpinan kepala madrasah yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadits.
2. Sejauh mana kepala madrasah dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadits.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tipe kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah NU Raudlatul Mu'allimin - Wedung?
2. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran Al-Qur'an-Hadits di Madrasah Aliyah NU Raudlatul Mu'allimin - Wedung?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi tipe kepemimpinan kepala madrasah di Madrasah Aliyah NU Raudlatul Mu'allimin Wedung ?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan hasil belajar Al-Qur'an-Hadits di Madrasah Aliyah NU Raudlatul Mu'allimin Wedung ?

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Islam di UNISNU Jepara.
  - b. Menambah wawasan keilmuan tentang peranan kepala madrasah dalam meningkatkan hasil belajar Al-Qur'an-Hadits
2. Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi kepala madrasah dalam upaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan meningkatkan kompetensi guru.
  - b. Sebagai bahan masukan bagi kepala madrasah bahwa setiap siswa itu mempunyai kelebihan dan potensi yang bisa ditingkatkan.
  - c. Bahan acuan kepada para penulis selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis adalah merupakan susunan atau urutan dalam pembuatan tesis ini, yang dimaksud untuk memudahkan pembahasan pembahasan yang ada di dalam. Sistematika penulisan tesis ini meliputi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan dengan mengemukakan pokok-pokok pikiran latarbelakang munculnya permasalahan, kemudian diidentifikasi masalah dan dikemukakan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian, untuk mengetahui apa tujuan penelitian yang sebenarnya baik dari segi kegunaan ilmiah maupun kegunaan praktis.

Bab kedua adalah landasan teori mengemukakan deskripsi teori, penelitian terdahulu dan sistematika berpikir. Deskripsi teori menjelaskan tentang kepala madrasah, pengertian kepemimpinan kepala madrasah, kepemimpinan menurut pandangan islam, tipe-tipe kepemimpinan, implimentasi kepemimpinan kepala madrasah, prestasi belajar, dan mata pelajaran Al-Qur'an-Hadits serta hal-hal yang terkait. Penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan apakah penelitian ini masih urgen untuk diteliti atau tidak, sudah ada yang meneliti atau belum untuk menghindari adanya plagiat atau tiruan terhadap tesis. Sistematika berpikir berisi jalan pikiran peneliti yang berhubungan dengan penelitian kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan prestasi belajar Al-Qur'an-Hadits

Bab ketiga, adalah metode penelitian, pada bab ini dijelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data serta teknik analisis data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini dijelaskan deskripsi data, analisis data yang diperoleh selama penelitian dan pembahasan hasil penelitian serta keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian tersebut.

Bab V adalah penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.

Dalam penelitian ini juga dilengkapi daftar pustaka, lampiran data penelitian, dan riwayat pendidikan peneliti.